



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 798/I/2014

II/JANUARI 2014



Pimpinan DPR Undang Menpan & RB Bahas Percepatan Reformasi Setjen DPR



KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA JANUARI 2014

Minggu kedua Januari 2014, kegiatan Dewan difokuskan pada persiapan pembukaan Masa Persidangan III 2013-2014 yang dibuka pada 15 Januari 2014. Pada Masa Sidang yang akan berlangsung selama 36 hari kerja, fokus kegiatan AKD DPR ditekankan pada fungsi legislasi 60%, untuk kegiatan pengawasan dan anggaran 40%.

Agenda Masa Sidang III

Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III dibuka tanggal 15 Januari 2014 dengan acara tunggal Pidato Ketua DPR-RI. Dalam pidato, Ketua DPR menyampaikan laporan rencana kegiatan untuk Masa Sidang III, berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, serta kegiatan lain yang mendesak, diantaranya pembahasan persetujuan atas calon-calon anggota BPK (antar waktu), calon Hakim Agung (periode II tahun 2013), calon pengganti Hakim Konstitusi, dan calon anggota Dewan Energi Nasional (2014-2019).

Fungsi Legislasi

Pada fungsi legislasi, Dewan akan menindaklanjuti Keputusan Rapat Paripurna 17 Desember 2013 mengenai Penetapan RUU Prolegnas Prioritas 2014 sebagaimana dilaporkan Ketua Badan Legislasi DPR-RI. Dalam Rapat Paripurna tersebut telah disetujui 66 RUU Prolegnas Prioritas 2014, terdiri atas: [1] 34 RUU yang sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I; [2] 6 RUU dalam tahap harmonisasi di Baleg; [3] 13 RUU dalam tahap Akhir Penyusunan oleh DPR; [4] 7 RUU dalam tahap Akhir Penyusunan oleh Pemerintah; [5] 4 RUU baru, disiapkan oleh DPR; [6] 1 RUU baru, disiapkan Pemerintah; [7] 1 RUU baru, disiapkan oleh DPD.

Selain 66 judul RUU tersebut, telah disepakati pula 5 RUU yang berifat kumulatif terbuka, yaitu: RUU kumulatif terbuka perjanjian internasional, akibat putusan Mahkamah Konstitusi, yang berkaitan dengan APBN, pembentukan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU menjadi UU.

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



Program RUU prioritas 2014 ditangani oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yaitu Komisi-Komisi dan Panitia Khusus. Komisi I diantaranya, RUU Perubahan UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan RUU tentang Perjanjian Internasional. Komisi II, RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah dan RUU tentang Pertanahan. Komisi III, RUU tentang MA, RUU tentang perubahan atas UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, RUU tentang KUHP, RUU tentang KUHP. Komisi IV, RUU tentang Perubahan UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Komisi V, RUU tentang Jalan. Komisi VI, RUU tentang Perdagangan. Komisi VIII, RUU tentang Jaminan Produk Halal. Komisi IX, RUU tentang Tenaga Kesehatan, RUU tentang Keperawatan, dan RUU tentang Kesehatan Jiwa. Komisi XI, RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah, RUU tentang perubahan atas UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

RUU-RUU lain ditangani oleh Pansus, antara lain, RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, RUU tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Tabung Perumahan Rakyat, RUU tentang Keamanan Nasional, RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat, RUU tentang Kepalaengmerahan. Dan-lain-lain.

Dalam Masa Sidang II yang lalu, telah diselesaikan 6 RUU Prioritas, yaitu: [1] RUU perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (RUU dari Pemerintah). Dalam RUU ini telah dibahas dan disetujui 32 pasal perubahan. Ditegaskan bahwa urusan dokumen kependudukan



menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat yang dilaksanakan instansi pelaksana di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kewajiban Pemerintah Provinsi, Kab/Kota, yaitu penyajian Data Kependudukan berskala Provinsi/Kab/Kota dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

[2] *RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)*, merupakan inisiatif DPR. Pokok-pokok substansi RUU ini antara lain diatur bahwa, Aparatur Sipil Negara adalah profesi. Dengan penetapan ASN sebagai profesi, diperlukan adanya azas, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, serta pengembangan kompetensi. Tidak ada lagi dikotomi antara PNS Pusat dan PNS Daerah. Diatur juga mengenai usia pensiun bagi pejabat administrasi (58 tahun) dan pejabat pimpinan tinggi (60 tahun), serta pejabat fungsional (sesuai peraturan). Proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, pada prinsipnya, dilakukan secara terbuka dan kompetitif.

[3] *RUU tentang Desa* yang merupakan RUU inisiatif Pemerintah. Substansi RUU yang penting adalah dalam konteks pengaturan desa berdasarkan azas rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, dan pemberdayaan yang berkelanjutan.

[4] *RUU tentang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, merupakan perubahan atas UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dalam rangka mengisi kekosongan hukum akibat putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 12 Juni 2011, yaitu berkaitan dengan pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Dengan perubahan UU ini, diharapkan dilakukan upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dibutuhkan masyarakat, dan negara bertanggungjawab memfasilitasi kebutuhan tersebut. Diatur mengenai pemberian ijin kepada pihak lain yang tidak mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan, melakukan pengurusan, pengelolaan dan pengawasan.

[5] *RUU tentang Perindustrian*, inisiatif pemerintah, sebagai pengganti UU No. 5 tahun 1985 tentang Perindustrian. Persaingan industri yang ketat menuntut Pemerintah mempersiapkan dukungan berupa perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan terpadu, dan pengelolaan secara efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pembangunan industri dilakukan melalui pembentukan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang bertujuan mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian dalam jangka waktu 20 tahun.

[6] *RUU jabatan Notaris*, inisiatif DPR, merupakan perubahan atas UU No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam RUU perubahan ini, diatur mengenai penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, penambahan kewajiban notaris, pemberhentian sementara notaris, persyaratan mengenai magang bagi calon notaris, dan beberapa hal prinsip lainnya, antara lain dibentuknya majelis kehormatan notaris.

Tentang RUU Pembentukan DOB yang ditangani Komisi II dalam forum Rapat Konsultasi Pimpinan DPR, Ketua Komisi II dan Kapoksi Komisi II dengan Menko Polkam dan Mendagri. Kesimpulannya antara lain: Pemerintah bersama DPR akan melanjutkan proses pembahasan Pembentukan DOB dengan memprioritaskan daerah yang telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran. Pembahasan DOB akan dilakukan secara selektif, serta mempertimbangkan urgensi dan kepentingan nasional. Sebelum melakukan pembahasan terhadap daerah-daerah yang memiliki masalah keamanan, Pemerintah diminta melakukan koordinasi dengan aparat keamanan setempat guna mendapat masukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Fungsi Pengawasan

Semua Tim pengawas yang dibentuk DPR akan melanjutkan tugasnya dalam Masa Sidang III. Tim-tim tersebut yaitu: Tim Pengawas Century, Timwas Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria, Timwas Perlindungan

TKI, dan Tim pemantau pelaksanaan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No 1 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua.

Pada Masa Sidang II bulan Desember 2013, semua Tim melaporkan kegiatannya. Diantaranya, yaitu: Timwas Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria masih melanjutkan tugas. Permasalahan pertanahan sangat kompleks dengan melibatkan banyak pihak, sarat dengan kepentingan masyarakat, seperti hubungan masyarakat atas hak atas tanahnya, hubungan negara dengan tanah, kepemilikan tanah oleh masyarakat hukum adat, kepemilikan tanah oleh instansi negara seperti TNI, Polri, BUMN, BUMD. Tim ini juga akan bekerja dengan fokus kepada penyelesaian RUU tentang Pertanahan. RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dan dikaitkan dengan RUU Desa yang sudah disahkan. Ketua tim juga mengatakan bahwa kendala dalam menangani masalah ini karena belum ada *grand design* atas penyelesaian sengketa pertanahan dan konflik agraria yang harus disusun berdasar pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 5 tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria.

Timwas Perlindungan TKI yang telah melaporkan kegiatan dan akan melanjutkan tugas-tugasnya dengan fokus di bidang legislasi, perlunya mendorong percepatan penyelesaian pembahasan RUU tentang perubahan UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. Dalam RUU ini kiranya perlu diatur mengenai pentingnya MoU antara Pemerintah Indonesia dengan negara tujuan, terlebih bagi negara tujuan yang belum mempunyai UU Perlindungan Tenaga Kerja. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan ratifikasi terhadap beberapa konvensi, antara lain Konvensi ILO No 189 tentang *domestic worker* (kerja layak bagi pekerja rumah tangga). Tim ini memfokuskan kepada masalah perlindungan TKI di luar negeri, khususnya di Malaysia dan Arab Saudi. Permasalahan dan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan masalah nasional yang sangat kompleks. Permasalahan sudah muncul sejak masa pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Permasalahan TKI

yang paling mendasar justru berada di dalam negeri, yang melibatkan tidak kurang dari 21 Kementerian/Lembaga dan Badan. Di lapangan, masing-masing Kementerian, Lembaga dan Badan mengedepankan ego sektoral, belum terkoordinasi dengan baik.

Tim pemantau pelaksanaan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No 1 tahun 2001 tentang Otsus Bagi Provinsi Papua. Tim ini diperpanjang masa tugasnya. Untuk pelaksanaan UU PA, Tim memantau bahwa masih terdapat 5 Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) dan 1 rancangan Peraturan Presiden (Perpres)

yang belum ditetapkan oleh Pemerintah. Selain itu, tim juga memandang bahwa prioritas yang perlu dilakukan adalah mengawasi pelaksanaan dana Otsus. Hingga 2012 telah mencapai 20,8 triliun. Peruntukannya harus diprioritaskan untuk infrastruktur, pengentasan kemiskinan, ekonomi rakyat, sosial dan kesehatan. Juga dipantau mengenai pelaksanaan kebijakan lain yang menyangkut pembangunan kawasan pelabuhan bebas Sabang dan pengelolaan SDA Aceh. Tim meminta dilakukannya optimalisasi pelaksanaan otsus papua setelah diterbitkannya Inpres No 5 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi

Papua dan Papua Barat. Dengan Inpres ini pemerintah memberikan perhatian melalui dana alokasi khusus kepada kementerian terkait. Alokasi tambahan dana merupakan tambahan dana on top dari dana alokasi dana Otsus dan dana Otsus infrastruktur. Dalam 3 tahun terakhir memang ada peningkatan alokasi anggaran K/L di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tim akan melanjutkan tugasnya, terutama dengan terbitnya Perpres No. 5 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Perpres No 66 tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.**

Pimpinan DPR Undang Menpan & RB Bahas Percepatan Reformasi Setjen DPR



Menpan/RB Azwar Abubakar didampingi Ketua DPR RI Marzuki Alie dan Wakil Ketua Sohibul Iman, menggelar jumpa pers usai pertemuan.

Dalam rangka mempercepat Reformasi Kesetjenan DPR, Ketua DPR Marzuki Alie didampingi Wakil Ketua Sohibul Iman, Pimpinan BURT dan Sekjen DPR, Senin (6/1) menggelar rapat tertutup dengan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar di Gedung DPR Senayan, Jakarta.

“Kami ingin Reformasi Kesekjenan bisa diselesaikan, maka hari ini Pimpinan DPR menangani langsung dengan Menteri PAN/RB. Sebab selama ini di level dibawah menteri lambat sekali prosesnya, maka ingin dipercepat,” ungkap Ketua DPR Marzuki Alie kepada pers usai pertemuan.

Menurut Marzuki, kesekjenan akan direorganisasi menjadi tiga eselon I. Sebelumnya satu eselon I tetapi dibantu juga beberapa eselon I dibawahnya dan sangat tidak efektif dan ini sangat mengganggu kinerja, tidak mensupport kinerja DPR.

“Karena itu, hari ini kita sepakat bahwa Kesetjanaan DPR akan dipecah menjadi tiga badan fungsional keahlian menyangkut teknis yang mendukung kerja-kerja anggota DPR, kemudian kesetjanaan yang menyangkut administrasi keuangan dan SDM termasuk penyiapan fasilitas infrastruktur, yang ketiga inspektur jenderal, bertugas mengawasi pertanggungjawaban keuangan di DPR,” ungkapnya.

Dijelaskan Marzuki, ini adalah tugas terakhir DPR periode sekarang dalam mereformasi DPR, sehingga diharapkan DPR ke depan (periode 2014-2019) tidak akan lagi mengalami seperti DPR sekarang ini.

“Kami menyiapkan institusi/kelembagaan yang membangun DPR kuat, berdiri sejajar dengan pemerintah, sehingga komentar sedikitnya produk

UU oleh DPR tidak ada lagi,” jelas politisi Partai Demokrat ini.

Wakil Ketua DPR Sohibul Iman menambahkan, reformasi Kesetjanaan DPR disesuaikan dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru saja disahkan, sehingga sangat memungkinkan badan fungsional keahlian ini *take over*.

“Ada ahli lalu direkrut DPR dalam jangka waktu tertentu. Mereka pegawai pemerintah dengan perjanjian tertentu, itu dimungkinkan oleh UU ASN yang baru diresmikan. Diharapkan pada 1 Oktober 2014 saat anggota baru DPR dilantik, maka kesekjenan sudah berwajah baru,” katanya.

Menteri PAN/RB Azwar Abubakar mengatakan, keinginan Pimpinan DPR tersebut searah dengan reformasi birokrasi yaitu memperkuat kelem-

bagaan. “Selama itu memperkuat, meningkatkan kompetensi, kita dukung,” tegasnya.

Bisa digambarkan, nantinya ada tugas-tugas *supporting* keuangan, kepegawaian tetapi substansi DPR. DPR sekarang, kata Azwar, punya tugas mengajukan RUU sehingga harus ditingkatkan kemampuannya. *Supporting* yang dimaksud, bisa dari PNS biasa juga bisa dari pegawai pemerintah dengan pembidangan keahlian kerja.

“Nanti DPR bisa merekrut doktor lima atau tiga tahun, sehingga akan meningkatkan kompetensi DPR,” tegasnya. Ditanya kapan akan diberlakukan kebijakan tersebut, Ketua DPR menegaskan “segera”. (mp), foto : naefurodjie/parle/hr.

DPR Sarankan Dewan Kelautan Tarik Draf RUU Kelautan dari DPD

DPR RI menerima Dewan Kelautan RI yang menanyakan progres mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan. Ketua DPR RI menyarankan kepada Dewan Kelautan untuk menarik draf RUU tentang Kelautan dari Dewan Perwakilan Daerah RI, diganti menjadi inisiatif Pemerintah.

“Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan sudah lama tidak mampu diselesaikan, maka saya sarankan kepada Dewan Kelautan untuk itu ditarik saja kemudian diganti menjadi inisiatif Pemerintah,” kata Ketua DPR RI Marzuki Alie setelah menerima Dewan Kelautan Dedy H. Sutisna dan Syahroni R. Nasir, hadir pula Ketua Badan Legislasi Ignatius Mulyono, Rabu (8/1), di Gedung DPR RI.

Marzuki Alie menjelaskan pada dasarnya yang menyusun selama ini dari Kementerian Kelautan juga, karena usulan disampaikan dari DPD, dan terkait dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi. “DPD ingin pembahasan itu dilakukan secara tripartit, sedangkan dalam amanat konstitusi tripartit tidak ada,” ungkapnya.

Persoalan pembahasan tripartit tidak bisa dilakukan, sehingga RUU ini tidak mungkin diselesaikan. Oleh karena itu, sarannya sebaiknya ditarik saja sebagai usulan pemerintah.

“Kita harapkan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan bisa selesai dan tuntas, sehingga kerugian besar karena potensi kelautan Indonesia diambil negara-negara lain yang jumlahnya cukup besar bisa kita selamatkan dengan adanya UU ini,” jelasnya.



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Diungkap Marzuki, selama ini yang menyusun mereka tapi mereka melalui DPD. Mungkin tadinya DPD minta bantuan Kementerian Kelautan, kemudian DPD melanjutkan kepada DPR. Sesuai dengan amanat konstitusi hal itu menjadi inisiatif DPR, sedangkan masukan bisa dari DPD atau dari rakyat. Tapi ada keputusan konstitusi yang memberikan hak yang lebih kepada DPD, akhirnya mereka menarik untuk dijadikan inisiatif DPD, tidak mau jadi inisiatif DPR.

Karena jadi inisiatif DPD, pembahasan pasti jadi buntu.

Tidak mungkin ada pembahasan, karena pembahasan tripartit itu tidak dikenal didalam amanat konstitusi. “Kewenangan membentuk Undang-Undang adalah DPR dan disahkan bersama Pemerintah. Tidak ada bersama DPD, itu masalahnya,” tegas Marzuki Alie .

Selanjutnya, dia mengatakan Keputusan MK itu mungkin dalam konteks pengusulan, tidak dalam tahap pengesahan. “Sehingga dari pada macet sebaiknya ditarik saja kepada Dewan kelautan atas nama Pemerintah menyampaikan DPR untuk dijadikan usul inisiatif DPR,” kata Marzuki. (as) foto: naefurodje/parle.

Kapolri Diminta Tunjuk Wakil yang Bersih

Anggota Komisi III DPR RI Harry Witjaksono meminta Kapolri memilih wakil yang bersih dan mempunyai wibawa untuk melanjutkan penataan di dalam tubuh organisasi Korps Bhayangkara ini. Oleh sebab itu kandidat yang akan dimunculkan harus memiliki rekam jejak yang baik.

“Wakapolri itu nantinya lebih banyak bertugas ke dalam melanjutkan reformasi internal. Ia harus bersih karena tugasnya membersihkan orang lain. Rekam jejak yang positif akan memudahkan untuk bersikap tegas dan memberikan sanksi kepada oknum yang melanggar hukum,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (9/1/14).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga mengingatkan seorang Wakapolri juga harus mampu mengimbangi Kapolri, namun disini lain dia harus tetap tampil sederhana. Seiring upaya pembersihan internal, Wakapolri diharapkan dapat membangun koordinasi yang baik dengan penegak hukum lain diantaranya KPK.

Pada bagian lain Harry, wakil rakyat dari daerah pemilihan Depok dan Bekasi ini berharap publik dapat melihat pergantian Wakapolri sebagai proses yang wajar. “Jangan ditarik kemana-mana, apalagi ke ranah politik. Penggantian ini karena Wakapolri Komjen Oegroseno segera memasuki



Anggota Komisi III DPR RI Harry Witjaksono.

masa pensiun bulan depan, itu saja,” tandasnya.

Sebelumnya LSM *Indonesia Police Watch* (IPW) menyampaikan keterangan pers meminta Kapolri segera bersikap menghadapi pergantian posisi Wakapolri. Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane mengkhawatirkan apabila tidak cepat bersikap akan mengundang tarik menarik berbagai kepentingan yang dapat mengganggu konsolidasi kepolisian. (iky) foto: iwan armanias/parle.

DPR Desak Kemenparekraf Perhatikan KBS

Nama Indonesia di mata dunia kembali tercoreng, pasalnya seorang reporter situs Inggris MailOnline, Richard Shears, menjuluki Kebun Binatang Surabaya (KBS) sebagai kebun binatang terkejam di dunia atau **zoo of death**. Ia memantau langsung kondisi KBS, dan menemukan binatang-binatang di bonbin ini telantar dan tidak dirawat dengan benar. Tentu predikat **zoo of death** bukanlah predikat yang patut disandang oleh Indonesia.

Ironisnya lagi, KBS kembali memakan korban. Selasa, (7/01) lalu, seekor singa jantan (*panthera leo*) berumur



Anggota Komisi X DPR Jefirston R. Riwu Kore.

1,5 tahun bernama Michael ditemukan mati tergantung di kandangnya. Ber-

dasarkan hasil autopsi, leher Michael terjerat tali baja yang digunakan sebagai penarik pintu kandang.

Melihat kondisi ini, Anggota Komisi X Jefirston R. Riwu Kore sangat menyayangkan kejadian di bonbin yang terletak di Surabaya Selatan, Jawa Timur. Dengan adanya pemberitaan di media luar tersebut, mempengaruhi nama pariwisata Indonesia di mata dunia.

“Dengan adanya pemberitaan media luar negeri tersebut, ini pasti mempengaruhi mata dunia terhadap Indone-

sia, baik skala besar maupun kecil. Termasuk mempengaruhi wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang akan berkunjung ke bonbin ini. Itu menjadi catatan Komisi X. Kami akan meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menindaklanjuti kasus ini,” tegas Jefirstson saat dihubungi Tim Parle via telepon, Kamis (9/01).

Politisi Demokrat ini juga mempertanyakan bagaimana peran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam menangani kasus KBS ini. Ia menilai, Pemda kurang memperhatikan kondisi KBS.

“Menurut saya, Pemerintah Daerahnya kurang memberikan perhatian terhadap kondisi KBS. Mungkin perlu ada perhatian lebih serius lagi dari Pemdanya. Sedangkan untuk Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemenparekraf, minimal saya mendesak dan mempertanyakan bagaimana perhatian pemerintah terhadap KBS ini,” tambah Jefirstson.

Politisi dari Dapil Nusa Tenggara Timur ini juga meminta pengurus bonbin dapat menjaga aset yang ada di KBS. Pasalnya, KBS merupakan aset negara dan aset daerah, yang seharusnya

dipelihara dan dijaga. Selain itu, dengan adanya bonbin ini, pemerintah dapat membantu masyarakat khususnya Jawa Timur, untuk *refreshing* dan berinteraksi dengan hewan.

“Wisatawan yang berkunjung ke bonbin sebagai salah satu tempat untuk *refreshing* atau menghilangkan stress. Pengurus bonbin seharusnya bukan hanya mengurus konflik internal, tapi juga memperhatikan kondisi hewan dan pengunjung bonbin. Kalau tidak ada KBS, mau rekreasi dimana lagi?” tanya Jefirstson. (sf) foto: naefu-rodjie/parle.

Komisi X Sambut Positif Hadirnya Bus Wisata

Anggota Komisi X DPR RI, Itet Tridjajati Sumarijanto menyambut positif kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan bus tingkat wisata. Bus-bus ini akan mengantarkan turis lokal maupun mancanegara ke beberapa tempat wisata di Ibukota Jakarta.

“Ini hal yang positif tidak hanya bagi tempat wisata di DKI Jakarta saja, tetapi juga semua destinasi atau tempat tujuan wisata lainnya di Indonesia. Selain itu bis wisata juga menimbulkan efek domino di dalamnya. Pariwisata menjadi aset kedua Indonesia setelah Migas,” jelas Itet.

Diungkapkan Itet, efek domino yang dimaksud adalah selain menjadi ajang promosi obyek-obyek wisata lain di seluruh Indonesia terutama yang masih minim pengunjung, seperti museum dan tempat-tempat bersejarah lainnya. Bus wisata ditambahkan Itet juga bisa menyerap tenaga kerja seperti ahli sejarah untuk bertindak sebagai pemandu di dalam bus wisata dengan menceritakan sejarah-sejarah Indonesia. Bahkan dengan segala kreatifitas pemandu, kemacetan yang ditemui di jalan-jalan ibukota bisa dijadikan sebagai wisata macet.

“Menikmati kemacetan dalam sebuah perjalanan wisata. Bisa sambil menikmati musik, bahkan di dalam bis, pemandu bisa menceritakan tentang gedung-gedung atau tempat wisata yang tengah dilewati dalam kondisi jalan yang macet. Karena menurut saya di negara lain tidak ada kemacetan seperti di Indonesia. Sehingga kemacetan juga bisa menjadi wisata macet. Siapa yang ingin mengalami kemacetan lalu lintas ya silahkan datang ke Indonesia,” papar politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Itet menilai dengan adanya bus pariwisata yang disediakan Pemprov DKI sekarang ini bisa menjadi salah satu solusi dalam mengurangi kemacetan. Karena keluarga yang ingin berwisata tidak perlu menggunakan mobil pribadi lagi. Bahkan dikatakannya, tidak jarang orang malas berwisata karena kondisi jalanan yang macet, belum lagi sulitnya mencari lahan parkir di area tempat wisata. Hal inilah yang bisa menjadi penyebab

minimnya pengunjung di beberapa obyek wisata. Dan dengan adanya bis wisata ini, masyarakat yang ingin berwisata ke beberapa obyek wisata tidak perlu khawatir untuk mencari lahan parkir serta menghindari jalanan yang macet.

“Apalagi konon bis wisata ini juga telah dirancang ramah dengan kaum difabel (cacat) karena *floor deck*-nya akan dibuat pendek, hal ini tentu semakin memudahkan teman-teman yang memiliki kekurangan fisik untuk tetap mengunjungi tempat-tempat wisata,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui pemprov DKI Jakarta telah membeli 5 (lima)

unit bus tingkat wisata. Bus itu akan berhenti di sejumlah tempat tujuan wisata Jakarta, seperti museum, Gedung Kesenian Jakarta (GKJ), maupun aset kesenian lain. Tak hanya berhenti di obyek wisata, bus tingkat itu juga akan berhenti di beberapa obyek perbelanjaan, seperti Ratu Plaza atau Sarinah. Penumpang bis ini konon tidak akan dikenakan biaya alias gratis. Tujuan Pemprov DKI dengan menghadirkan bis wisata ini tidak lain untuk menarik minat wisatawan lokal dan mancanegara untuk berduyun-duyun datang ke tempat-tempat wisata Jakarta. (Ayu) foto: iwan armanias/parle.



Anggota Komisi X DPR RI, Itet Tridjajati Sumarijanto.

Sekjen DPR Apresiasi P3S Pertahankan Eksistensinya



Sekjen DPR Winantuningtyastiti memberi sambutan dalam Rapat Tahunan P3S DPR RI.

Sekjen DPR Winantuningtyastiti mengapresiasi upaya Pengurus Persatuan Pensiunan Pegawai Setjen (P3S) Setjen DPR untuk terus mempertahankan eksistensi sekaligus mempertahankan berbagai kegiatan yang dilakukan. Dengan modal keikhlasan, ketulusan P3S tetap eksis sehingga diharapkan para anggotanya untuk terus mendukung.

“Meskipun sifatnya hanya kekerabatan, tetapi P3s bisa menjadi organisasi yang besar sebab ada AD/ART, laporan pertanggungjawaban dan program tahunan. Insya Allah bisa menjadi perkumpulan seperti di

kementerian atau lembaga yang lain,” ujar Winantuningtyastiti saat memberikan sambutan pada rapat tahunan Persatuan Pensiunan Pegawai Setjen (P3S) DPR-RI di Gedung DPR, Senayan, Rabu (8/1).

Menurut Win, panggilan akrab Sekjen DPR ini, sebetulnya kegiatan P3S ini rutin sebagai silaturahmi para pensiunan pegawai Setjen DPR. Ini adalah forum kebersamaan mereka dengan diisi berbagai kegiatan yang sifatnya kerohanian, kesehatan ada juga seksi usaha. “Sekali lagi ini kebersamaan dan saya kira bagus. Ini mendorong agar pensiunan tetap

beraktifitas sekaligus juga menjaga hubungan dengan karyawan DPR yang masih aktif,” ungkap Sekjen DPR.

Selaku Pembina P3S, dia berharap organisasi ini ke depan lebih konsisten, seperti dari seksi usaha bisa memilih pengurus yang baru pensiunan sehingga agak *fresh* tenaganya sebab menyangkut pertanggungjawaban keuangan. Bahkan lanjutnya, seksi usaha P3S bisa diarahkan kepada yang lebih profesional seperti menjadi nara sumber dan bisa atau tukar pengalaman kepada pegawai DPR yang baru.

Wakil Ketua P3S Suwardjo dalam kesempatan ini melaporkan berbagai kegiatan yang dilakukan selama tahun 2013 antara lain, melakukan kerjasama dengan Korpri Setjen DPR, Koperasi Pegawai Setjen DPR dan PWRI. Selain itu menjadi rekanan di Setjen DPR dan instansi lainnya yang dilakukan seksi usaha dan jasa.

Seksi lainnya yaitu seksi sosial, kerohanian dan pertemuan berkala serta seksi kesenian dan rekreasi senantiasa menggelar acara rutin untuk memperkuat tali silaturahmi dan kebersamaan sesama pensiunan. Anggota P3S DPR-RI hingga kini tercatat 660 orang, dimana 50% lebih tinggal di luar Komplek Setjen DPR di wilayah DKI Jakarta.

(mp) foto: naefurodjie/parle.

Ketetapan Multi Tarif Biaya Nikah Menjadi Solusi Sementara

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Mahrus Munir menganggap kebijakan multitarif atas biaya nikah yang merupakan hasil kesepakatan dari pertemuan Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, KPK dan BAPPENAS beberapa waktu lalu merupakan solusi yang tepat untuk keadaan darurat seperti saat ini.

“Untuk saat ini saya menganggap

hasil pertemuan tersebut bisa menjadi solusi yang tepat untuk sementara waktu atau dalam kondisi darurat seperti sekarang ini. Paling tidak dengan ketentuan tersebut ada pegangan bagi penghulu dalam memberikan pelayanan publik,” jelas Mahrus Munir saat dihubungi Senin (6/1)

Mahrus mengatakan, sebelumnya dirinya beberapa kali bertemu lang-



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Mahrus Munir.

sung dengan para penghulu baik di Dapilnya, Jawa Timur X maupun di dae-



rah lainnya di Indonesia. Ketika itu ia menerima aspirasi para penghulu yang meminta petunjuk dalam melakukan pelayanan publik berupa jasa menikahkan beserta besaran biayanya.

Mengingat sebelumnya sempat terlonar pernyataan dari Irjen Kemenag, M Yasin dimana pemberian sesuatu yang lebih dari masyarakat kepada penghulu baik itu berbentuk uang atau bingkisan adalah sebagai sebuah bentuk gratifikasi.

Oleh karena itu untuk menghindari tudingan gratifikasi tersebut, para penghulu khususnya yang berada di Jawa Timur beberapa waktu lalu sempat sepakat untuk melakukan pelayan

publik berupa jasa pernikahan hanya di dalam KUA (Kantor urusan agama) dan di dalam jam kerja saja. Namun dengan adanya kesepakatan tersebut membuat para penghulu lega saat melakukan pelayanan publik.

Meski demikian ditambahkan Mahrus, kesepakatan Multi tarif tersebut harus tetap dikaji ulang atau dirumuskan kembali. Karena ada poin yang masih kurang jelas. Salah satunya adalah poin keempat, dimana untuk pelayanan menikah yang dilakukan di gedung akan dikenakan tarif atau biaya sebesar 1 juta rupiah.

“Gedung itu kan kategorinya berbeda, ada gedung besar, hotel, namun

ada gedung yang hanya berupa aula pertemuan RW atau Kelurahan yang tidak seberapa besar. Apa itu juga disamakan tarifnya, sementara kedua kategori tersebut jelas berbeda dari biaya penyelenggaraan pernikahannya,” ungkap Politisi dari Fraksi Demokrat ini.

Menurut Mahrus, ketiga poin kesepakatan lainnya sejauh ini tidak ada masalah. Ketiga kesepakatan lainnya tersebut adalah nikah gratis bagi masyarakat tidak mampu, tarif pelayanan nikah di KUA bagi yang mampu sebesar 50 ribu, nikah di luar KUA dan jam kerja sebesar 400 ribu rupiah. (Ayu)/
foto:iwan armanias/parle.

Kenaikan Harga Elpiji Mestinya Bertahap



Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman.

Harga elpiji tabung 12 kg melejit drastis, hingga membuat kisruh di tengah masyarakat dan kontroversi di media massa. Mestinya, Pertamina menaikkan harga elpiji secara bertahap, tidak langsung menaikkan harganya hingga 60%.

Iman, usai rapat Pimpinan DPR dengan Menteri PAN di DPR, Senin (6/1), menyatakan, sebetulnya kenaikan tersebut logis seperti direkomendasikan oleh BPK. Hanya saja, kenaikannya begitu drastis. Itulah yang memicu kontroversi. Dan BPK juga tidak bisa disalahkan, karena tidak bisa mengintervensi Pertamina terlalu jauh hingga penentuan harga elpijinya.

“Secara prinsip, saya melihat sebetulnya logis untuk dinaikkan. Tapi, persoalannya BPK tidak mengatur teknis kenaikan ini. Di titik inilah sesungguhnya letak kesalahan Pertamina. Mengapa Pertamina menaikkan sedemikian drastis. Harusnya mereka melakukan satu upaya yang lebih bertahap, sehingga tidak berpengaruh pada perekonomian dan daya beli masyarakat,” ungkap Sohibul Iman.

Pertamina, lanjut Sohibul, perlu diperbaiki betapa pun itu sangat logis untuk dilakukan kenaikan. Kenaikan yang langsung 60% jelas membebani rakyat. Seperti diketahui, hasil audit BPK menyatakan, selama ini harga elpiji 12 kg nonsubsidi terlalu rendah, sehingga membuat Pertamina selalu merugi hingga Rp7,7 triliun. Namun, pemerintah juga perlu mencermati dampak sosial yang ditimbulkan.

Sohibul menegaskan, bila Pertamina menaikkan harga elpiji tersebut lantaran rekomendasi BPK, itu tidak tepat. Kewajiban BPK hanya mengaudit dan mengeluarkan rekomendasi. Sementara penentuan kenaikan harga dan dampak sosialnya ada di tangan pemerintah dan Pertamina. “Ini PR pemerintah bagaimana mengatur agar kenaikan ini tidak berdampak,” ucap Sohibul. (mh), foto : naefurodjie/parle/hr.

Wakil Ketua DPR RI M. Sohibul

Teknis menaikkan harga elpiji oleh

Konsil Keperawatan Tetap di Bawah Kendali Pemerintah

Ketua DPR Marzuki Alie didampingi Wakil Ketua Sohibul Iman Senin (6/1) di gedung DPR, Senayan menggelar pertemuan tertutup dengan Menteri PAN/Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar membahas perkembangan RUU Keperawatan.

Sesuai pertemuan, Marzuki Alie menjelaskan kepada pers bahwa acara tersebut membicarakan tentang Konsil Keperawatan dalam RUU Keperawatan yang kini masih dibahas Komisi IX. “Kementerian PAN dan RB sudah tidak ada masalah sepanjang Konsil ini tetap di bawah kendali pemerintah. Terserah mau otonom atau tidak itu masalah

teknis, tetapi Konsil ini masuk dalam UU Keperawatan,” ungkapnya didampingi Menpan&RB dan Wakil Ketua DPR Sohibul Iman.

Lebih lanjut Ketua DPR mengatakan, RUU Keperawatan ditargetkan bisa diselesaikan pada masa yang akan datang. Sesuai agenda, Masa Persidangan III tahun 2013/2014 akan dibuka pada Rabu (15/1).

Dengan lahirnya UU Keperawatan, Dewan berharap menjadi jawaban sekaligus harapan bahwa perawat kita betul-betul kompeten, mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai fungsi tugas dan fungsi keperawatan.

UU Keperawatan tersebut sangat penting untuk menunjang kinerja perawat. Sebab, dengan adanya UU itu, para perawat dapat lebih profesional dan dilindungi oleh payung hukum.

Dalam UU Keperawatan antara lain diatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perawat, mulai pendidikan keperawatan, adanya konsil keperawatan maupun sebagai payung hukum yang melindungi perawat



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat diwawancara wartawan.

ketika melakukan tindakan keperawatan. (mp), foto : naefu-rodjie/parle/hr.

Pemerintah Diminta Kaji Ulang SIBI

Anggota Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah mengkaji ulang penggunaan SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia) yang diterapkan pemerintah untuk para tuna rungu. Pasalnya, setelah mendapat laporan dari para penyandang tuna rungu yang tergabung dalam PPD (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) beberapa waktu lalu, para tuna rungu merasa kesulitan menggunakan SIBI, yang menurut mereka lebih membingungkan atau lebih “ribet”. Para tuna rungu lebih memilih menggunakan BISINDO atau bahasa isyarat Indonesia yang menjadi bahasa Isyarat mereka.

“Pada dasarnya bahasa itu tergantung dari apa dan siapa yang menggunakannya. Jika standarisasi penggunaan bahasa SIBI oleh pemerintah tidak bisa digunakan dan tidak bisa dimengerti oleh teman-teman tuna rungu, maka sudah seyogyanya pemerintah mengkaji ulang kebijakan penetapan SIBI sebagai bahasa Isyarat oleh Kemendiknas untuk bahan ajar di sekolah luar biasa (SLB),” jelas Ace, Senin (6/1).

Ditambahkannya, akan sia-sia jika pemerintah tetap mempertahankan kebijakan tersebut, karena sesungguhnya bahasa isyarat tersebut diperuntukkan bagi para tuna rungu untuk memudahkan mereka berkomunikasi satu sama lain, dan berkomunikasi dengan orang lain.



Anggota Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily.

“Syukur Alhamdulillah keinginan teman-teman dari PPD termasuk teman tuna rungu untuk merevisi UU No.4

Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat atau disabilitas ini masuk dalam prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun 2014. Semoga apa yang diharapkan teman-teman tuna rungu tentang bahasa isyarat yang mereka pahami dan biasa mereka gunakan juga bisa terakomodir di dalamnya,” ungkap politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Untuk diketahui perbedaan metode SIBI dengan Bisindo itu sangat mendasar. SIBI menggunakan satu tangan untuk berkomunikasi dengan mengartikan per kata. Sedangkan, bahasa isyarat Indonesia (Bisindo) yang direkomendasikan dalam konferensi penyandang cacat Asean di Jakarta pada Desember 2011 lalu menggunakan dua tangan dan orang normal (non tuna rungu) pun dapat dengan mudah berkomunikasi. Misalnya, untuk mengatakan aku ingin berlari, jika SIBI diartikan dengan satu tangan dan perkata, namun dalam Bisindo, untuk mengatakan itu hanya menggerakkan kedua tangan sebagaimana orang berlari. (Ayu), foto : doc. parle.



Kenaikan Harga Elpiji Bisa Dianulir

Masyarakat dikagetkan dengan kenaikan harga elpiji 12 kg hingga 60%. Di beberapa daerah, elpiji yang biasa dijual dengan harga Rp 70 ribu, melonjak menjadi Rp 117 ribu per tabung. Bahkan, di tingkat agen, gas tabung berwarna biru ini mencapai harga Rp 135-145 ribu per tabung.

Ketua DPR RI Marzuki Alie, yang ditemui usai rapat tertutup dengan Menteri PAN/RB di Gedung Nusantara III, Senin (6/01) menyatakan kenaikan harga elpiji ini bisa dianulir.

“Pertamina memang mendapatkan hak monopoli terhadap penyediaan elpiji yang diperuntukkan untuk rakyat. Walaupun memiliki hak monopoli, tapi bukan berarti berlaku sewenang-wenang dengan alasan *corporate action*. Hak monopoli itu artinya ada penugasan, harusnya yang memberi tugas bisa menganulir hal itu,” ujar Marzuki.

Politisi Demokrat ini menambahkan, Pertamina seharusnya lapor dulu jika ingin mengubah harga elpiji. Paling tidak, dengan DPR, yang notabene

merupakan mitra Pertamina.

“Kalau monopoli, artinya Pertamina harus melapor dulu. Karena ini kepentingan publik. Paling tidak, dengan mitranya, yaitu DPR dan juga atasan yang menugaskan, bahwa ingin menaikkan harga elpiji beserta alasannya, dan penjelasan bagaimana dampaknya, ini harus dijelaskan. Tidak semena-mena menaikkan harga,” imbuh Marzuki.

Selain itu, tambah Marzuki, karena pengendalian Pertamina ada di Pemerintah, maka Pemerintah harus bisa mengendalikan. Monopoli diberikan kepada Pertamina untuk mengatur perdagangan elpiji, untuk menyediakan kebutuhan masyarakat, dan menjual elpiji dengan harga yang sesuai kemampuan masyarakat.

“Ini harus disadari. Kalau Pertamina mengikuti mekanisme pasar, sistem untung rugi, maka hak monopoli itu sebaiknya tidak diberikan. Harusnya diberikan kebebasan kepada pengusaha untuk impor elpiji untuk memenuhi kepentingan publik. Jadi, Pertamina tidak seenaknya sendiri menaikkan



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

harga,” imbuh Marzuki.

Marzuki melihat ada yang kurang pas di permasalahan elpiji ini. Ia menilai, di era saat ini, tidak ada monopoli, kecuali penugasan.

“Saya melihat ini ada yang kurang pas, karena pasarnya itu monopoli. Jadi yang bisa jual beli elpiji itu hanya Pertamina. Hak monopoli dalam era sekarang ini kan sebenarnya tidak ada, kecuali dengan penugasan. Kalau penugasan negara, harusnya melapor, bahwa perdagangan elpiji itu merugikan Pertamina,” tambah Marzuki. (sf,mp), foto: naefurodjie/parle/hr.

Komisi III Cermati Kejanggalan Penggerebekan Terduga Teroris

Wakil Ketua Komisi III Almuzammil Yusuf mengaku mencermati laporan LSM KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) yang menemukan sejumlah kejanggalan dalam penggerebekan terduga teroris di Ciputat, Tangerang Selatan pada malam tahun baru lalu. Laporan ini menurutnya patut ditindaklanjuti.

“Kalau ada temuan KontraS soal tidak ditemukan bekas tembakan balasan di lokasi, ini perlu dicermati. Kita bisa mengundang KontraS agar mereka bisa menceritakan temuan mereka, tapi karena sedang reses lebih baik hal ini segera disampaikan kepada pimpinan dewan, Pak Priyo yang membidangi Korpolkam,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin



Wakil Ketua Komisi III Almuzammil Yusuf.

(7/1/14).

Politisi FPKS ini menekankan sebagai pasukan terlatih Densus 88 seharusnya memiliki kemampuan dan persenjataan yang dapat melumpuhkan para terduga teroris yang sudah terkepung. Kepentingan untuk mengorek informasi diantaranya soal jaringan pelaku, seharusnya jadi prioritas.

“Kalau berfikir mengungkap jaringan, posisi yang sudah terkepung sangat memungkinkan untuk ditangkap hidup-hidup. Jadi dikurung saja, orang beberapa hari tidak makan, kan bisa lemes atau lempar saja gas air mata orang akan keluar, gunakan *sniper*, banyak cara tidak perlu kita ajarkan tetapi ini kok ditembak mati. Bandar narkoba saja yang sudah divonis mati tidak segera kita

eksekusi atas nama HAM,” tandasnya.

Muzammil mengaku sudah beberapa kali mempertanyakan hal ini tetapi menurutnya pemerintah seperti sudah tidak mendengarkan. Ia kemudian mengingatkan segenap pihak isu terorisme, sangat mudah untuk ditunggangi siapapun terkadang digunakan untuk membelokkan isu yang lebih besar.

“Sekarang sedang ramai isu Century, bisa saja dibelokkan dengan isu seperti ini. Terorisme sangat efektif membelokkan isu, mendramatisasi isu penangkapan yang seperti itu

akan menjadi berita utama kan?” tekannya.

Dalam keterangan persnya KontraS yang sudah meninjau langsung ke tempat kejadian perkara memaparkan sejumlah kejanggalan diantaranya, tidak menemukan bekas peluru di mushalla serta rumah warga yang berada di depan rumah terduga padahal kepolisian menyatakan terjadi tembak menembak cukup lama. Pelaku dilaporkan melemparkan bom, namun anehnya tidak ada bekas ledakan di luar rumah terduga teroris. (iky)/foto:iwan armanias/parle.

Titip Doa Itu Baik, Tetapi Jangan Minta Uang

Baru-baru ini, sempat heboh program titip doa ke Tanah Suci. Namun, program yang digagas oleh Ahmad Gozali, perencana keuangan sekaligus pengurus akun @Sedekah-Harian, mendapat kecaman dari berbagai pihak. Pasalnya, program titip doa ini memiliki “tarif”, yaitu donator perlu memberikan sedekah minimal sebesar Rp 100 ribu dan Rp 2014.

Anggota Komisi VIII DPR Ali Maschan Moesa menilai program titip doa itu sebenarnya baik, namun akan menjadi tidak benar jika mewajibkan untuk memberikan sedekah.

“Menurut saya, titip doa itu baik. Tapi kalau minta uang juga itu yang tidak benar. Di Mekkah itu memang tempat yang baik untuk memanjatkan doa. Cuma ini lucu, kok minta uang. Inikan yang tidak benar. Masyarakat harus sadar, kalau mau titip doa, ya kepada orang yang tulus, yang tidak minta uang,” ujar Maschan ketika dihubungi Reporter Parle via telepon, Jumat (3/01).

Politisi PKB ini khawatir, program ini menjadi tidak tulus, karena berbau komersil, dengan memungut uang kepada para donatur. Sehingga, niatnya bukan karena Allah, tapi karena uang.

“Kalau dititipin doa tapi juga minta uang, berarti doanya bukan karena Allah tho? Itu soal ketulusan niat. Ada sesuatu kalau sampai minta uang. Saya khawatir, niatnya bukan karena Allah. Dan berarti, kalau tidak ada uangnya, tidak mendoakan,” tambah Politisi Dapil Jawa Timur ini.

Ia mengingatkan kepada masyarakat untuk menghindari hal seperti ini. Ia menilai, keberangkatan haji maupun umrah cukup banyak tiap tahunnya, sehingga jika ingin titip doa, sebaiknya yang memang tulus mendoakan, bukan karena uang.

“Boleh saja kalau mau titip doa. Tapi dengan ketulusan, bukan dengan minta uang. Hal seperti ini perlu dihindari. Yang berangkat haji kan banyak, bisa minta tolong titip doa. Ibadah apapun itu jenisnya, harus karena Allah. Tidak boleh selain kepada Allah,” imbu Maschan.



Anggota Komisi VIII DPR Ali Maschan Moesa.

Dalam pemberitaan yang beredar, Ahmad menyatakan bahwa @SedekahHarian memberi kesempatan bagi para donator untuk menitipkan doa melalui dirinya yang berada di Tanah Suci. Terkait dengan nominal sedekah, ia pun mengakui kesalahannya dalam membuat ketentuan dalam brosur yang mencantumkan nominal tertentu. Ahmad menyatakan, nominal tersebut dimaksudkan sebagai contoh bagi donator baru dan untuk memudahkan identifikasi program sedekah.

Dalam iklan yang disebar @SedekahHarian, program bernama #titipDoaBaitullah ini meminta donator untuk mentransfer rekening tertentu kemudian mengkonfirmasi ke e-mail Sedekah Harian. Donatur juga mencantumkan isi titip doa ke e-mail tersebut. Rencananya, program #titipDoaBaitullah berlangsung dari 31 Desember 2013 hingga 7 Januari 2014. (sf), foto : naefurodjie/parle/hr.



Anggota Komisi III DPR RI Martín Hutabarat.

Terkait Dana Optimalisasi, KPK Perlu Minta Komitmen Partai

perlu dibicarakan adalah meminta partai agar melarang anggotanya di parlemen membancak dana optimalisasi.

“Sekarang seharusnya KPK dapat memanfaatkan popularitasnya itu dan meminta komitmen para pimpinan partai dan meminta anggotanya di parlemen tidak membancak dana optimalisasi untuk kepentingan pemilu, ngomong saja begitu,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (31/12/13).

Anggota Komisi III DPR RI Martín Hutabarat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan komunikasi dengan para pimpinan partai menjelang pelaksanaan Pemilu 2014. Salah satu agenda yang

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyebut sebenarnya dugaan penyalahgunaan dana optimalisasi ini sudah menjadi rahasia umum. Kalau sekarang KPK mengekspose hal ini menurutnya sudah terlambat. Ia juga meminta pemerintah tidak perlu takut dengan DPR dalam proses pembahasan dana optimalisasi ini di parlemen.

“Sebenarnya pemerintah jangan ikut-ikutan mentolerir, harus tegas jangan takut sama DPR kalau masalah anggaran negara. Kita dukung KPK mengawasi dana optimalisasi ini agar tidak jadi bancakan untuk pemilu, fokusnya bagaimana memperbaiki negara ini menjadi lebih baik,” tekannya.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Zulkarnain menyebut pada tahun 2014 terdapat dana optimalisasi sebesar Rp.26,96 triliun, dialokasikan untuk 32 kementerian dan lembaga. KPK menurutnya akan mencermati dan mendorong penggunaan dana tersebut secara transparan. Ia berharap kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah yang menjerat mantan anggota Banggar DPR Wa Ode Nurhayati jangan sampai terulang kembali. (iky) foto: iwan armanias/parle.

Pimpinan DPR Dorong RUU Pro Rakyat Diprioritaskan Pembahasannya



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Ketua DPR Marzuki Alie mengungkapkan, dari ketiga fungsi DPR yaitu

legislasi, pengawasan dan penetapan APBN, ada yang agak memprihatinkan terkait fungsi legislasi. Pimpinan DPR dalam kaitan ini sudah berusaha keras bagaimana produktifitas legislasi ini bisa ditingkatkan dengan memfasilitasi berbagai rapat konsultasi. Juga memanggil Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi-komisi untuk mengupayakan bagaimana semua alat perlengkapan Dewan memberi perhatian serius terhadap fungsi legislasi.

Tetapi rupanya belum menampakkan hasil, sehingga Pimpinan Dewan mengubah polanya dengan memprioritaskan rancangan undang-undang (RUU) yang pro rakyatlah yang didahulukan pembahasannya.

“Karena itu kita prioritaskan RUU yang benar-benar diperlukan oleh rakyat, kita dorong untuk diselesaikan,” tegasnya kepada wartawan Senin (30/12) mengenai refleksi akhir tahun atas kinerja DPR selama tahun 2013.

Sedangkan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Ketua DPR menilai telah berjalan baik dengan berbagai bentuk yang dilakukan komisi maupun pansus dengan mitra kerjanya. Meski demikian, dalam soal pengawasan ini ada yang khusus tampil cukup menonjol seperti Tim Pengawas kasus Bank Century kendati lebih banyak ke konteks politiknya. Kepada aparat penegak hukum Marzuki mendesak

agar tidak meninggalkan sisa pekerjaan pada akhir periode ini.

Untuk pelaksanaan fungsi penetapan APBN, Ketua DPR menilai sebagai rutinitas dan bisa menyelesaikan dengan baik, tepat waktu. Walaupun begitu, secara substansi DPR belum memiliki lembaga pendukung yang mampu berdiskusi setara dengan pemerintah.

Khusus masalah pemberantasan korupsi, Pimpinan DPR dari Partai Demokrat ini mengatakan selain KPK ada aparat lain yang juga melakukan pemberantasan korupsi yaitu kejaksaan dan kepolisian. Kasus-kasus yang diungkap Kejaksaan jumlahnya ribuan sedangkan KPK beberapa puluh kasus. Namun publikasi KPK sangat luar biasa, dan masuk ke ranah politik apalagi yang ditangkap orang-orang politik.

“Itu yang menunjukkan seolah-olah hanya KPK saja yang bekerja memberantas korupsi, padahal kejaksaan juga melakukan penindakan dan banyak kasus korupsi yang ditindaklanjuti. Jadi jangan hanya KPK, aparat penegak hukum lain juga perlu diapresiasi,” tukasnya dengan menambahkan, semuanya masih ada kekurangan termasuk KPK. Tidak ada manusia 100% sempurna, masih ada godaan setannya. “Ini yang harus dipahami.” (mp) foto: doc. parle.

Paripurna DPR Setujui 22 RUU Usul Inisiatif DPR



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung saat memimpin Sidang Paripurna.

“Pimpinan ingin menanyakan kepada sidang yang terhormat, apakah usulan untuk menjadi inisiatif RUU Otonomi Daerah yang baru dapat disetujui,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, saat Rapat Paripurna DPR, Kamis (19/12). “Setuju....,” sambut anggota Dewan secara bersamaan, dan palu diketuk.

Berikut ke 22 Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR, RUU tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan natuna Selatan di Provinsi Kepulauan Riau, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Natuna Barat di Provinsi Kepulauan Riau, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Indragiri Selatan

di Provinsi Riau, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Cilangkahan di Provinsi Banten.

Selanjutnya, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Caringin di Provinsi Banten, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Cibaliung di Provinsi Banten, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tayan di Provinsi Kalimantan Barat, RUU tentang Pembentukan Kota Sebatik di Provinsi Kalimantan Utara, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah di Provinsi Sulawesi Selatan, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tomini Raya di Provinsi Sulawesi Tengah.

RUU tentang Pembentukan Kabupaten Balanipa di Provinsi Sulawesi Barat, RUU tentang Pembentukan Kota Samawa Rea di Provinsi Nusa Tenggara Barat, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Galela Loloda di Provinsi Maluku Utara, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kambu di Provinsi Papua, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Biak Napa Swandiwe di Provinsi Papua, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Mimika Barat di Provinsi Papua, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Mimika Timur di Provinsi Papua, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Moni di Provinsi Papua, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Yamo di Provinsi Papua, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Lembah Roufaer di Povinsi Papua. (nt), foto : iwan armanias/parle/hr.



Wakil Bicara

“Secara prinsip, saya melihat kenaikan harga LPG sebetulnya logis sesuai rekomendasi BPK. Tapi persoalannya BPK tidak mengatur persoalan teknis kenaikan ini. Dititik inilah sesungguhnya letak kesalahan Pertamina, mengapa menaikkan sedemikian drastis. Harusnya bertahap sehingga tidak berpengaruh pada perekonomian dan daya beli masyarakat.”



Wakil Ketua DPR RI M. Sohibul Iman.

“Kalau berfikir mengungkap jaringan, posisi yang sudah terkepung sangat memungkinkan untuk ditangkap hidup-hidup. Jadi dikurung saja, orang beberapa hari tidak makan, kan bisa lemes atau lempar saja gas air mata orang akan keluar, bisa juga menggunakan sniper. Banyak cara tidak perlu kita ajarkan tetapi ini kok ditembak mati. Bandar narkoba saja yang sudah divonis mati tidak segera kita eksekusi atas nama HAM.”



Al Muzammil Yusuf, Wakil Ketua Komisi III.

“Semakin banyak yang mendoakan semakin baik doa itu, tapi tentu harus dengan keikhlasan dari dalam hati, bukan karena adanya imbalan materi. Titip doa kok komersil sih. Kalau urusan haram dan halal nya biar MUI saja yang bicara.”



Ida Fauziyah, Ketua Komisi VIII DPR RI

DPR Apresiasi Infrastruktur Bali



Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR pantau pembangunan infrastruktur Bali.

Komisi V DPR RI mengapresiasi berbagai pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Pada penghujung September lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meresmikan Jalan Tol Bali Mandara, dimana tol ini merupakan tol yang berada di atas laut, dan menghubungkan tiga daerah penting, yakni Nusa Dua, Ngurah Rai dan Benoa.

Selain itu, dengan selesainya pembangunan underpass Simpang Dewa Ruci diharapkan dapat mengurai kemacetan yang sering terjadi pada jam-jam sibuk. Simpang yang dulu dikenal dengan Simpang Siur ini memiliki panjang 450 meter, yang terdiri dari akses 2 arah, dan 4 lajur. Bandara Ngurah Rai juga berbenah dengan menambah terminal baru untuk kedatangan internasional per 19 September lalu.

Anggota Komisi V Sadarestuwati menyatakan rasa bangganya terhadap pembangunan infrastruktur di Bali. Anggota Dewan yang akrab dipanggil Estu ini bertambah bangga ketika mengetahui desain Jalan Tol Bali Mandara dirancang oleh putra-putra Indonesia.

“Kalau saya melihat tol Bali Mandara, saya sangat bangga. Putra

bangsa sendiri bisa mendesain jalan tol yang sangat fenomenal di bangsa ini, dan ini satu-satunya di Indonesia. Ini benar-benar ditangani oleh tangan putra-putri Indonesia sendiri, tanpa bantuan dari negara lain,” kata Estu saat melakukan kunjungan spesifik Komisi V ke Bali, Rabu (18/12).

Politisi PDI Perjuangan ini yakin, kontribusi yang diberikan oleh putra bangsa terhadap Tol Bali Mandara bukan hanya menjadi contoh untuk Badan Penyelenggara Jalan Tol (BPJT) saja. Kementerian Pekerjaan Umum juga bisa menggandeng putra bangsa sendiri, mulai dari mendesain, hingga proses membangun.

“Jika kita ingin mengembangkan putra-putri Indonesia, kita berikan ruang dan tempat, agar mereka bisa menyalurkan pikiran-pikiran yang mereka punya. Saya yakin, ahli-ahli asal Indonesia tidak kalah dengan ahli dari luar negeri,” imbuh Politisi asal Jawa Timur ini dengan bangga.

Ia juga mengaku bangga dengan pembangunan terminal baru di Bandara Ngurah Rai. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan negara lain.

“Jujur saya katakan juga di Bandara

Ngurah Rai ini, saya sangat bangga. Kita bisa katakan bangsa ini mampu bersaing dengan bangsa yang lainnya. Bandara ini buktinya. Bangsa Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Kita bangga dengan bangunan bandara yang megah ini, selain Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara. Sebentar lagi kita juga akan memiliki bandara internasional Juanda di Jawa Timur,” jelas Estu.

Pembangunan ini, tambah Estu, diharapkan bisa menjadi inspirasi untuk Provinsi lain. Berbagai pembangunan di Bali ini sekaligus menjadi tolak ukur untuk pengembangan dan membangkitkan ekonomi suatu daerah. Ya ini kuncinya, yaitu membangun infrastruktur,” tambah Estu.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi V Laurens Bahang Dama. Ia menilai, dengan berbagai pembangunan infrastruktur ini dapat menambah citra Indonesia di mata dunia.

“Bali ini menjadi perhatian dunia, dan berkali-kali juga masuk daftar *The Best Island in The World*, dengan adanya jembatan itu, pasti akan menambah citra Indonesia di mata dunia. Semoga ini menjadi inspirasi untuk daerah lain,” jelas Politisi F-PAN ini.

Ia juga mengingatkan agar terminal baru di Bandara Ngurah Rai perlu melakukan koordinasi dengan pihak terkait, sehingga arus mudik akhir tahun ini tidak mengalami gangguan.

“Sarana prasarana dan infrastruktur sudah cukup bagus. Untuk Bandara Ngurah Rai yang memiliki terminal baru, mungkin nanti perlu koordinasi antara Angkasa Pura, maskapai penerbangan, bandara, kepolisian, kesehatan, apalagi menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Dari setiap *stakeholder* yang melayani masyarakat ini yang penting,” pesan Laurens.

Dalam kunjungan spesifik ke Bali ini, Komisi V memantau Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Underpass Dewa Ruci, Jalan Tol Bali Mandara, dan Bandara Internasional Ngurah Rai Bali.

(sf)

Komisi V Keluhkan Pasokan Listrik Bandara Ambon

Komisi V DPR RI mengeluhkan Pasokan Listrik, di Kota Ambon. Tim Kunjungan Spesifik dalam rangka persiapan hari raya natal dan Tahun Baru 2014. Komisi V mencatat ada pengalaman, bahwa pasokan listrik untuk memfungsikan instrumen navigasi kepada Angkasa Pura, jangan sampai menjadi kendala.

“Jika pasokan listrik terjadi kendala, maka akan terjadi kejadian yang fatal terhadap penerbangan,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena, saat berlangsung pertemuan dengan mitra kerja dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Senin (16/12), di Ambon.

Kunjungan dipimpin Michael Wattimena dari Fraksi Demokrat, dengan Anggota Tim Etha Bulo (F-PD), Agus Bastian (F-PD), Agung Budi Santoso (F-PD), Yoseph Umar Hadi (F-PDIP), Yudi Widiana Adia (F-PKS), Andi Muawiyah Ramly (F-PKB).

Maksud dari kunjungan ini, untuk melihat secara langsung kesiapan infrastruktur menjelang Natal tahun 2013 dan tahun baru 2014, yang meliputi bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, BMKG dan SAR, serta kesiapan lalu lintas dan angkutan jalan oleh Ditlantas Polda Provinsi Maluku.

Kepala Angkasa Pura Bandara Pattimura Ambon, Hailendra Waworuntu, menjelaskan Bandara Pattimura panjang *runway* 2.500 meter dengan 2



Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena memimpin pertemuan di Bandara Pattimura, Ambon.

take way, dengan fasilitas keselamatan penerbangan yang siap melayani selama 24 jam, dengan 10 perusahaan penerbangan.

Lalu lintas penerbangan per hari, ada 34 pergerakan *take off* dan *landing*, dengan 2730 penumpang, dan kargo 10 ton perhari. Namun Bandara Pattimura melakukan proses penambahan kapasitas genset 1.000 KVA, untuk mengantisipasi kendala pasokan listrik.

Pada saat angkutan Natal tahun lalu, ada kenaikan 25 persen dari kondisi normal atau 15 persen diatas rata-rata nasional. Antisipasi lonjakan penum-

pang pihak Angkasa Pura bersama Tim dari Dinas Perhubungan Provinsi memonitori perusahaan penerbangan yang melakukan penjualan tarif tiket berdasarkan Keputusan Menteri perhubungan.

“AP I hanya bisa merekomendasikan kepada Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Perhubungan Udara lah yang bisa bertindak,” ungkap Hailendra.

Dengan demikian kesiapan Bandara Pattimura Ambon selama Natal 2013 dan Tahun baru 2014, difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan dalam hal ini SDM terutama *frontliner*. (as)

UU Perindustrian Harus Lindungi Kawasan Cagar Budaya

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Sadarestuwati meminta kepada Pemerintah untuk mensinkronkan aturan UU Perindustrian yang baru saja diketok dengan UU Cagar Budaya. “Melalui cara ini jejak sejarah bangsa kita tidak hilang begitu saja,” ujarnya saat Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II, Kamis, (19/12).

Saat ini, lanjutnya, di Trowulan, Mojokerto direncanakan

akan dibangun pabrik Baja yang dikhawatirkan dapat merusak kawasan cagar budaya tersebut. Karena itu kita meminta segera ditetapkan kawasan Trowulan sebagai cagar budaya. “Saya meminta DPR mendukung langkah untuk menggagalkan rencana industri baja di kawasan itu,” ujarnya.

Seperti diketahui Bupati Mojokerto, Jawa Timur, Mustofa



Anggota DPR dari Fraksi PDIP Sadarestuwati.

Kamal Pasa menegaskan tidak akan mencabut izin pembangunan pabrik baja PT Manunggal Sentral Baja di kawasan peninggalan Kerajaan Majapahit di Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Pasalnya, Bupati yakin izin pabrik baja berada di lokasi yang nihil penemuan benda purbakala.

Menurut Mustofa, pihaknya mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi pabrik baja PT Manunggal di Trowulan, baru-baru ini. Namun, untuk izin *Hinder Ordonantie* (HO) atau izin gangguan

tempat usaha dan izin usaha industri belum dikeluarkan Pemkab Mojokerto.

Selain itu, Pemerintah daerah juga tak bisa memaksa PT Manunggal untuk merelokasi pabrik tersebut ke tempat lain karena Trowulan belum ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Terlebih, Direktorat Jenderal Kebudayaan sudah pernah melakukan penggalian di kawasan pabrik, tapi tidak ditemukan benda-benda purbakala yang terpendam di kawasan itu.

Pembangunan pabrik di sekitar Trowulan dikecam banyak pihak karena dinilai bisa merusak situs peninggalan Kerajaan Majapahit. Meski tidak dicabut izin pendirian bangunannya, pihak PT Manunggal menghentikan sementara pembangunan pabrik tersebut. (si) Foto: naefurodjie/parle

Bulukumba Layak Jadi Pusat Pengembangan Baru di Sulsel



Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR saat meninjau grand design Waterfront City di Bulukumba.

Lokasi strategis Kabupaten Bulukumba di daerah paling Selatan Pulau Sulawesi dengan potensi ekonomi yang tinggi, terutama wisata dan pertanian, selayaknya dikembangkan menjadi pusat pengembangan baru di daerah Sulawesi Selatan.

Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Bulukumba, Hetifah Sjaifudian saat mengunjungi Kabupaten Bulukumba.

“Bulukumba ini nantinya menjadi pe-

nyeimbang Kota Makasar yang sudah semakin padat,” kata politisi Fraksi Partai Golkar ini, di Bulukumba, Rabu (11/12).

Dari sisi infrastruktur dasar terutama jalannya, kata Hetifah, memang sudah ada upaya perbaikan dari pemerintah daerah setempat. Tapi hal tersebut, bisa dilakukan melalui upaya pelebaran jalan. Kemudian adanya pusat-pusat pengembangan di tepi pantai seperti *Waterfront City* yang memang juga direncanakan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

“Di situ bukan saja akan dibangun pusat pemerintahan, tapi juga pusat rekreasi dan *real estate*, serta pusat-pusat pengembangan lain untuk pengembangan pariwisata dan budaya setempat,” paparnya.

Selain berencana membangun *Waterfront City*, Pemerintah Kabupaten Bulukumba juga merencanakan membangun pelabuhan sebagai pusat penghubung termasuk ke daerah NTT dan NTB, maupun ke pulau-pulau sekitar seperti Pulau Selayar, termasuk membangun bandara perintis.

“Jadi memang sangat prospek pengembangan ekonominya, karena sudah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kabupaten Bulukumba termasuk daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi 8,9% dalam tahun ini,” papar Hetifah.

“Artinya ada kegiatan-kegiatan yang perlu difasilitasi sehingga nanti iklim investasi akan lebih berkembang lagi,” tambah politisi dari daerah pemilihan Kalimantan Timur.

Disisi lain, kata Hetifah, dirinya melihat kepemimpinan dari Bupati Bulukumba yang bersifat *Entrepreneurship Government*. Jadi tata kelola yang berwatak *entrepreneur*. Jadi betul-betul ingin menjadi daerah yang berkembang secara ekonomi dan tentunya infrastruktur menjadi persyaratannya.

“Nanti setelah kita memasuki Masa Sidang ini, tentunya catatan hasil Kunjungan Spesifik ini akan menjadi pertimbangan serius,” imbuhnya.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi V ke Kabupaten Bulukumba lainnya yaitu Roem Kono (F-PG/Ketua Tim), Nova Iriansyah (F-PD), Yasti Soepredjo

Mokoagow (F-PAN), A. Taufan Tiro (F-PAN), Andi Muawiyah Ramly (F-PKB), dan Yudi Widiana Adia (F-PKS). (sc)

DPR Setujui RUU ASN Menjadi UU

Akhirnya setelah melewati beberapa kali masa persidangan, Rapat Paripurna DPR, Kamis (19/12) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk disahkan menjadi UU.

“Apakah secara keseluruhan RUU ASN dapat disetujui menjadi UU,” kata pimpinan Rapat Paripurna Wakil Ketua DPR Pramono Anung. “Setuju....,” teriak anggota dewan bersamaan, dan palu pun diketuk tanda persetujuan.

Dalam laporannya, Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar mengatakan, secara keseluruhan, lahirnya RUU tentang Aparatur Sipil Negara ini merupakan sebuah tonggak bagi terwujudnya reformasi birokrasi dengan sistem dan model baru, yang akan mampu menata birokrasi pemerintahan menuju birokrasi yang profesional dalam melayani masyarakat, melalui pengembangan potensi sumber daya manusia, dengan menerapkan sistem karir terbuka yang berbasis pada manajemen sumberdaya manusia dengan mengedepankan merit sistem.

“Dengan disetujui RUU ASN ini, tujuan reformasi birokrasi diharapkan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan, meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan, meningkatkan efisiensi, dan menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif dan efektif,” jelasnya.

Agun menambahkan, manajemen ASN kedepan tentunya



Ketua Pansus RUU ASN Agun Gunanjar Sudarsa berjabat tangan dengan Menpan/RB.

tidak terlepas dari keberadaan KASN yang akan dibentuk, untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional, berkinerja, dan memberikan pelayanan adil dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat dan diharapkan dapat menjadi pemersatu NKRI.

“Untuk itu, kami juga mengingatkan Pemerintah terhadap beberapa amanat dalam RUU ini, yaitu menetapkan peraturan pelaksanaan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, membentuk KASN paling lama 6 bulan setelah RUU ini di undangkan, dan mewujudkan Sistem Informasi ASN pada Tahun 2015, serta melaksanakan penyesuaian lainnya terhadap ketentuan yang telah diatur, seperti masalah penggajian, pensiun dan jaminan,” terangnya. (nt), foto : iwan armanias/parle/hr.

Beberapa Pokok-Pokok Substansi Dalam RUU ASN

Didalam laporan tertulisnya dihadapan Sidang Paripurna, Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar menjelaskan bahwa didalam Rancangan Undang-Undang (RUU) ASN terdapat beberapa pokok-pokok substansi yang diatur.

Diantaranya, dalam RUU ASN ini menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebuah bentuk profesi, “Dengan penetapan ASN sebagai sebuah profesi, maka diperlukan adanya asas, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, serta pengembangan

kompetensi,” jelas Agun.

Pegawai ASN dalam RUU ini terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPKK). Selanjutnya, mengenai Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

“Khusus mengenai pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, proses pengisian jabatan ini dilakukan secara ter-

buka dan kompetitif, transparan dan akuntabel,” katanya.

Dari sisi kelembagaan, tambah Agun, dalam RUU ini Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi dan manajemen ASN. “Dalam penyelenggaraan kekuasaannya dibantu oleh Kementerian PAN RB, Lembaga Administrasi Negara (LAN), BKN, dan lembaga baru yang dibentuk yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” terang Agun.



Wakil Ketua DPR Pramono Anung didampingi Wakil Ketua Sohibul Iman.

Mengenai KASN, DPR memandang perlu keberadaan komisi ini untuk menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan manajemen ASN.

“Adanya sebuah Komisi pada dasarnya telah diamanatkan oleh UU No.43 Tahun 1999, namun belum terbentuk sampai sekarang, untuk itu melalui RUU ini diamanatkan pembentukan KASN sebagai lembaga mandiri yang bebas dari intervensi politik yang mempunyai kewenangan untuk me-

ngawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Tinggi dan mengawasi serta mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN,” tandas Agun yang juga Politisi Golkar ini.

Khusus mengenai Batas Usia Pensiun, setelah melalui forum lobby, pada akhirnya disepakati bahwa batas usia pensiun bagi Pejabat Administrasi adalah 58 tahun, dan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi 60 tahun dan

bagi pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi masing-masing Pejabat Fungsional.

Substansi pokok lainnya berisi mengenai Hak dan Kewajiban Pegawai ASN, Manajemen Pegawai ASN, Pada Bab Organisasi diatur mengenai pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps pegawai ASN RI, Sistem Informasi ASN, dan Penyelesaian Sengketa.

Secara keseluruhan, lanjut Agun, lahirnya RUU tentang Aparatur Sipil Negara ini merupakan sebuah tonggak bagi terwujudnya reformasi birokrasi dengan sistem dan model baru, yang akan mampu menata birokrasi pemerintahan menuju birokrasi yang profesional dalam melayani masyarakat, melalui pengembangan potensi sumber daya manusia, dengan menerapkan sistem karir terbuka yang berbasis pada manajemen sumberdaya manusia dengan mengedepankan merit sistem.

Akhirnya setelah melalui 12 kali masa persidangan, Rapat Paripurna DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyetujui RUU ASN menjadi UU. (nt), foto : iwan armanias/parle/hr.

DPR Janji Perjuangkan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Bulukumba

Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Roem Kono berjanji akan memperjuangkan anggaran terkait rencana Pemerintah Kabupaten Bulukumba membangun berbagai infrastruktur di Kabupaten Bulukumba.

“Kami lihat potensi daerah Bulukumba sangat luar biasa terutama dari segi ekonomi. Diperlukan peningkatan infrastruktur yang memadai terutama dengan adanya wisata pantai yang begitu indah. Ini harus ditunjang oleh infrastruktur udara dan jalan. Bahkan masalah perbaikan sungai-sungai yang mengancam Kota Bulukumba, termasuk juga irigasi,” papar Roem di sela-sela peninjauan berbagai infrastruktur, di Bulukumba, Selasa (10/12).

Menurut Politisi Partai Golkar ini, rencana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bulukumba menjadi perhatian Komisi V DPR RI. Roem menyatakan, aspirasi Kabupaten Bulukumba akan dibahas bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perhubungan pada saat pembahasan anggaran yang akan datang.

“Saya kira kebutuhannya menurut Pemerintah Kabu-



Tim kunjungan spesifik Komisi V DPR saat mengunjungi lokasi pembangunan Bendung Bayang-bayang, Bulukumba.

paten Bulukumba mencapai sekitar Rp 200 Milyar, karena itu akan kita lihat sampai sejauh mana masalah anggaran infrastruktur ini. Apakah anggaran untuk mensupport terutama pembangunan bandara dan irigasi, bisa mencapai Rp 200 Milyar atau tidak,” ujar Roem.

Lebih lanjut, politisi dari Daerah Pemilihan Gorontalo ini menyatakan, sebagai wakil rakyat harus betul-betul bisa memperjuangkan suatu kebijakan politik anggaran, agar daerah-daerah mendapatkan satu porsi daripada anggaran dalam rangka untuk peningkatan pertumbuhan daerah tersebut.

“Kalau hanya terpusat di salah satu daerah, dan tidak memperhatikan daerah lain apalagi yang memiliki potensi pembangunan ekonominya tinggi, itu harus diperhatikan. Harus ada *affirmative action*,” tandas Roem.

Dijelaskan Roem, keberhasilan pembangunan infrastruktur terutama di Kabupaten Bulukumba, selain dari sisi anggaran, akan sangat tergantung pada Kabupaten Bulukumba itu sendiri dalam menyiapkan berbagai bahan-bahan se-

bagai persiapan awal penunjang pembangunan, termasuk studi kelayakan untuk lokasi yang akan dibangun.

“Perlu ada *supporting* pada pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bulukumba,” imbuhnya.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba merencanakan membangun berbagai infrastruktur sebagai penunjang pembangunan di Kabupaten Bulukumba yang memiliki potensi ekonomi yang cukup bagus, antara lain pembangunan Bandara Perintis di Desa Ara, Bontobahari, pembangunan Pelabuhan Bira sebagai pintu masuk menuju Pulau Selayar dari Pulau Sulawesi, pembangunan *Waterfront City*, pembangunan Bulukumba Tower dan pembangunan Bendung Bayang-Bayang/Proyek Air Baku, serta pembangunan ring road di Bulukumba. (sc)

DPR dan Pemerintah Setujui 66 RUU Prioritas 2014

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah menyetujui dan menetapkan 66 Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-undang prioritas Tahun 2014. Hal tersebut menjadi tema tunggal dari rapat kerja Baleg DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin. Senin (16/12).

“Setelah melalui proses dan perdebatan yang cukup panjang dan lama, akhirnya kami (Baleg) menyetujui 66 Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014 dari 111 usulan RUU yang masuk,” jelas pemimpin rapat yang sekaligus sebagai Ketua Baleg, Ignatius Mulyono.

Ditambahkan Wakil Ketua Baleg yang juga sebagai Ketua Panja Prolegnas 2014, Abdul Kadir Karding, bahwa 66 Prolegnas RUU tersebut terdiri dari 34 RUU yang sudah dalam pembahasan tingkat I, dengan asumsi 4 RUU akan disahkan pada masa sidang 2012-2013 (tahun ini).

“Keempat RUU yang akan disahkan pada masa sidang sekarang adalah RUU ASN (Aparatur Sipil Negara), RUU Perindustrian, RUU tentang Perubahan UU No.30 Tahun 2004, dan RUU Desa,” ungkap Karding.

Selain 34 RUU yang sudah dalam pembahasan tingkat I, dalam 66 Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014 juga terdapat 26 RUU yang naskah akademiknya masih dalam penyusunan dan harmonisasi di Baleg. Lima RUU baru yang masih dalam penyusunan komisi-komisi DPR, serta satu RUU yang *draft* dan naskah akademiknya disiapkan oleh DPD.

“Alhamdulillah, semua fraksi di Badan Legislasi DPR RI menyetujui 66 RUU Prolegnas 2014 tersebut,” ucap Politisi dari Fraksi Kebangkitan Bangsa ini.

Senada dengan Baleg DPR RI, Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin



Ketua Baleg DPR RI Ignatius Mulyono berjabat tangan dengan Menkumham.

juga mengutarakan persetujuannya dengan penetapan 66 Prolegnas RUU Prioritas 2014 tersebut.

“Kami menyetujui 66 Prolegnas yang telah ditetapkan DPR RI, terutama yang menyangkut dua RUU strategis yang menjadi usulan kami, yaitu RUU KUHP dan RUU HAM,” kata Menkumham, Amir Syamsudin. (Ayu)/foto:odjie/parle.

Dalam 100 Tahun 75 Persen Hutan di Jawa Hilang

Data sejak tahun 1880, pulau Jawa memiliki luasan hutan 12 juta hektar. Kini, setelah 130 tahun berlalu, hutan di Jawa tinggal 3 juta hektar. Itu berarti setelah 100 tahun, sekitar 75% hutan di Jawa menghilang.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi IV DPR RI Siswono Yudohusodo (F-PG), baru-baru ini. Pulau Jawa telah mengalami kerusakan hutan yang parah. “Dalam menjaga 3 juta hektar yang tersisa, yang terdiri dari hutan alam dan konservasi 1 juta hektar,

kemudian hutan lindung dan hutan tanaman industri 2 juta hektar. Ini harus dijaga sebaik-baiknya. Jika tidak, akan hancur, tandas Siswono.

Seperti diketahui, para peneliti melansir hasil temuannya bahwa di du-



Anggota Komisi IV DPR Siswono Yudohusodo.

nia terjadi pengurangan luasan hutan seluas 50 kali lapangan bola per menit. Dan fantastisnya, Indonesia menyumbang 2 juta hektar deforestasi (keru-

sakan hutan) pada 2011-2012. Siswono menjelaskan, kerusakan hutan di Jawa selama bertahun-tahun sangat terlihat mencolok.

“Akibat kerusakan hutan di pulau Jawa yang parah itu, mengakibatkan erosi lahan yang luar biasa. Sungai-sungai di pulau Jawa coklat pekat penuh butiran tanah karena erosi. Selanjutnya di muara terjadi pengendapan, sehingga sungai cepat sekali mengendak. Akibatnya aliran air sungai terhambat dan banjir di mana-mana. Dan dampak erosi itu mengendap pula di waduk-waduk yang dibangun dengan harga mahal di Indonesia ini, sehingga usia waduk menjadi pendek karena pendangkalan.”

Di Banten, lanjut Siswono, hutannya tinggal 17% dari luas provinsi. Jawa Barat menyisakan 19% dari luas provinsi. Jawa Tengah 23% dari luas provinsi. Sementara di Jawa Timur yang tersisa hutannya tinggal 29% dari luas provinsi. “Idealnya, luasan hutan untuk pulau Jawa harus ada 30%,” jelas Siswono lebih lanjut.

Untuk deforestasi di Sumatera, Kalimantan, dan Papua dalam 30 tahun terakhir, kerusakan yang terjadi justru lebih parah daripada pulau Jawa. Hanya karena di 3 pulau tersebut luasan hutannya terlihat lebih luas, jadi dampaknya tidak separah di Jawa. Dengan kata lain, kehancurannya tidak terlalu jelas, tersamar oleh areal hutan yang masih luas. (mh) Foto: *odjie/parle*.

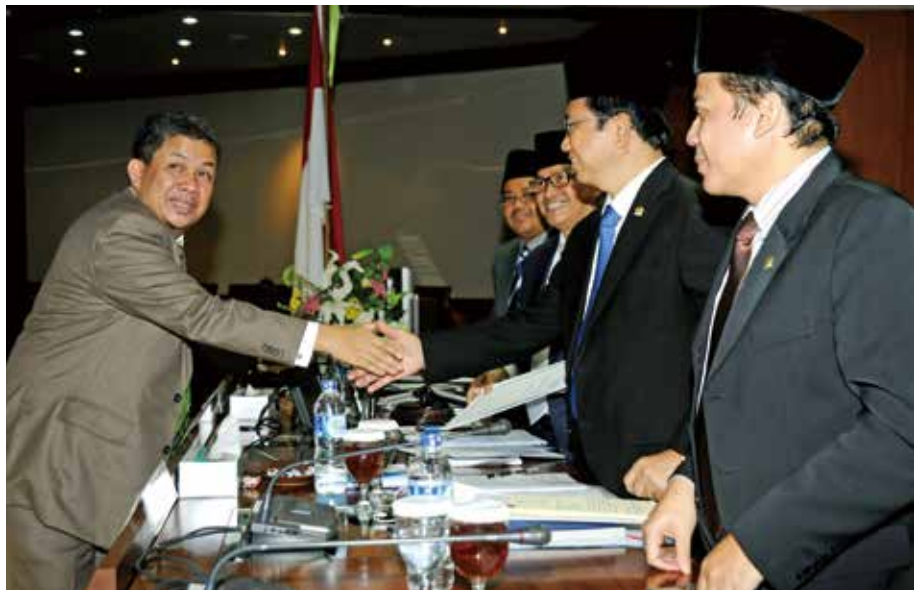
DPR Minta KPK tidak Bertele-tele Tangani Skandal Bank Century

Tim Pengawas kasus Bank Century DPR meminta KPK tidak bertele-tele dalam menangani kasus skandal Bank Century. Apalagi KPK telah menetapkan tersangka yaitu Budi Mulia dan Siti Fadrijah dan kawan-kawan. Terhadap masalah hukum utamanya korupsi, DPR akan tetap fokus mengawasi KPK.

Demikian salah satu rekomendasi Timwas Century DPR yang disampaikan Ketua Tim Kecil Fahry Hamzah dalam Sidang Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Pramono Anung di Gedung DPR Kamis (19/12).

Terkait dengan rekomendasi tersebut, Timwas DPR menyebutkan, dalam rangka penuntasan pengawasan terhadap penegakan hukum kasus ini, DPR dapat mempertimbangkan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat. Penggunaan hak ini sesuai pasal 193 UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan pasal 171 Peraturan DPR tentang Tata tertib untuk menuntaskan kasus Bank Century, khususnya yang berkaitan dengan penuntasan terhadap penegakan hukum oleh KPK.

Rekomendasi lainnya adalah sebelum Timwas Century mengakhiri



Ketua Tim Kecil Timwas Century Fachri Hamzah menyerahkan laporan kepada Ketua DPR Marzuki Alie.

tugasnya, Pemerintah dan DPR harus merumuskan skema pembayaran ganti rugi dana nasabah PT Antaboga yang telah diputuskan Mahkamah Agung.

Terhadap penanganan kasus nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas Timwas berkesimpulan belum mencapai perkembangan yang menggembirakan. Sampai saat ini Bank Mutiara masih berpegang teguh belum adanya

putusan pengadilan yang final dan mengikat sebab Bank ini mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan MA yang telah memenangkan nasabah PT Antaboga. Dengan demikian sampai saat ini nasabah PT Antaboga belum mendapatkan jaminan mengenai pengembalian dana mereka oleh Bank Mutiara. (mp), foto : *iwana armanias/parle/hr*.



Sistem Zoonasi Tidak Pinggirkan Nelayan Tradisional

Ketua Komisi IV DPR Romahurmuzyi membantah RUU Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) membuat nelayan tradisional terpinggirkan dan dapat dikriminalisasi karena adanya sistem zoonasi.

“Faktanya UU ini akan melibatkan masyarakat lokal, dan tetap memegang hukum adat,” ujarnya saat Konferensi Pers di Gedung Nusantara II DPR RI, Rabu, (18/12).

Guna melindungi nelayan tradisio-

nal, lanjutnya, Sesuai RUU PWP3K Pasal 26 A maka pemanfaatan Pulau-Pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing juga harus mendapat ijin menteri.

Pasal 20 ayat 1 secara tegas menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.

Sementara ayat 2 berbunyi izin se-



Ketua Komisi IV DPR Romahurmuzyi.

bagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. (si)/
foto:iwan armanias/parle.

Anggota DPR Dihimbau Pintar-pintar Bagi Waktu Selesaikan Tugas



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso.

Memasuki tahun politik 2014 yang begitu sibuk, para anggota DPR tentu akan terpusat perhatiannya ke Pemilu, baik Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres). Namun demikian, kerja legislator tak boleh diabaikan begitu saja, karena masih banyak RUU yang butuh penyelesaian segera.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso baru-baru ini di DPR. “Karena tahun ini begitu menentukan, maka perubahan peta politik dan perubahan kepemimpinan nasional akan berimbas ke DPR. Sebagian besar dari anggota DPR ini akan terserap energi dan waktunya untuk kerja politik tersebut,” katanya di Jakarta, baru-baru ini.

Seperti diketahui, mayoritas anggota DPR sekarang dicalonkan kembali oleh partainya untuk mengikuti Pileg. Bahkan, ada yang menjadi tim sukses Pilpres. “Nah, karena itu, saya akan mengajak kepada seluruh pimpinan DPR, pimpinan fraksi-fraksi, dan seluruh anggota DPR untuk pintar-pintar membagi waktu menyelesaikan tugas-tugas yang masih tersisa di parlemen ini, yang masih membutuhkan pikiran dan tenaga kita. Sementara panggilan lain juga tidak boleh tercecer, yaitu menyelesaikan kerja politik,” tandas Priyo lagi.

Ada banyak RUU yang butuh penyelesaian dan ketok palu segera, seperti RUU Pilkada dan RUU Pemda. Kedua RUU tersebut sudah masuk prioritas untuk segera diselesaikan tahun 2014. “Ini memerlukan tingkat keandalan dan seni dalam membagi waktu,” kilah politisi Golkar tersebut.

“Terus terang saya sendiri tidak boleh pesimis. Tetapi, saya mengatakan di tahun politik ini betapa sulitnya waktu yang terbatas ini untuk dimanfaatkan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan cara yang baik,” harapnya. (mh) *foto:iwan armanias/parle*



Marzuki Alie dalam konferensi pers mengundang Dirut PT Yodya Karya (Konsultan Perencana) dan Dirut PT Ciriayasa Cipta Mandiri (Konsultan Pengawas), terkait polemik pembangunan gedung baru DPR, Jumat (10/1) Foto: Naefurodjie/Parle.



Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI ke Bandara Ngurah Rai, Bali dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V Muhidin M Said, Rabu (18/12). Foto: Sofyan/Parle.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI dipimpin Ali Wongso Halomoan Sinaga meninjau akses infrastruktur jalan menuju bandara Kualanamu Sumut, Rabu (18/12). Foto: M. Husen/Parle.



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti memberi pengarahannya dalam Rapat Tahunan P3S Setjen DPR dilanjutkan silaturahmi dengan mantan-mantan Sekjen dan Wasekjen DPR, Rabu (8/1). Foto: Naefurodjie/Parle/HR.